

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN UPAYA PENINGKATANNYA DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI MENDUT KABUPATEN SEMARANG

TUGAS AKHIR

Oleh :
DHONI SUTRISNO
L2D 098 419



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2005**

ABSTRAK

Pemerintah daerah Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini adalah Sub Dinas Pengairan Kabupaten Semarang, berupaya untuk mulai menyerahkan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi Mendut kepada masyarakat Daerah Irigasi (DI) Mendut. Kebijakan ini didasarkan oleh ketentuan dari pemerintah pusat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai irigasi yang mengamanatkan program penyerahan pengelolaan irigasi (PPI) kepada masyarakat. Dengan program tersebut juga diharapkan dapat memandirikan masyarakat DI Mendut dalam mengelola jaringan irigasi mereka sendiri sehingga menunjang keberlanjutan dari pengelolaan jaringan irigasi tersebut.

Upaya PPI tersebut diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat DI Mendut untuk mengelola jaringan irigasinya sendiri melalui wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). P3A merupakan lembaga resmi bagi petani pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi.

Namun demikian beberapa masalah muncul dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, sulitnya menghimpun dana iuran irigasi dari masyarakat, penerapan manajemen kelembagaan P3A yang belum berjalan dan upaya sosialisasi pembinaan dari pemerintah yang belum terprogram. Dari beberapa masalah tersebut perlu dipertanyakan mengenai penerapan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut.

Untuk itu perlu adanya suatu analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan upaya-upaya peningkatannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kondisi secara lebih jelas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Sekaligus untuk mengetahui beberapa upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Analisis meliputi analisis mengenai karakteristik dan potensi masyarakat DI Mendut, analisis sosialisasi pembinaan dari pemerintah, analisis pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan jaringan irigasi dan analisis kemampuan masyarakat dalam mengelola jaringan irigasinya. Selanjutnya adalah analisis pemberdayaan masyarakat untuk memberikan gambaran kondisi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut dan analisis peningkatan pemberdayaan untuk mendapatkan alternatif upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deduktif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif rasionalistik. Obyek penelitian meliputi masyarakat petani, pengurus P3A dan pemerintah yang diwakili oleh sub Dinas Pengairan Kabupaten Semarang dan Ranting Tenganan.

Dari analisis-analisis yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal seperti bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut belum berjalan karena masih terdapat banyak elemen pemberdayaan masyarakat yang belum berjalan, seperti iuran irigasi yang belum berjalan, tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat masih kurang. Beberapa upaya peningkatan dapat dilakukan seperti upaya penguatan, pemungkinan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan.

Kata kunci : pemberdayaan, pengelolaan irigasi, Mendut

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai penopang perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Namun demikian hasil yang diharapkan dari sektor pertanian belum optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih belum mencukupinya hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani rendah.

Kondisi pertanian yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi pertanian, yang antara lain kurang optimalnya pengelolaan jaringan irigasi. Sebagai prasarana dasar pertanian, maka jaringan irigasi sangat penting dalam menunjang proses produksi pertanian. Pengelolaan jaringan irigasi juga menjadi sangat penting karena berkaitan dengan sumber daya air, dalam hal ini adalah air irigasi. Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin langka dan terbatas. Kondisi sumber daya air yang terbatas, sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif (Jurnal Litbang Pertanian 21(3), 2002).

Dari sudut pandang ilmu perencanaan wilayah dan kota, jaringan irigasi merupakan bagian integral dari perencanaan wilayah. Jaringan irigasi adalah prasarana wilayah yang penting dalam mendukung pengembangan wilayah. Namun selama ini dalam bidang penataan ruang terlalu banyak perhatian tercurah pada tata guna lahan dan pemanfaatan ruang, padahal sebetulnya yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sumberdaya air, yang notabene merupakan sumber utama kehidupan manusia (Budihardjo, 2001 dalam Kodoatie, et al, 2002).

Dalam konteks penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan jaringan irigasi di wilayah administratifnya sendiri. Dalam pengelolaan jaringan irigasi tersebut pemerintah daerah membutuhkan peran serta dan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat petani pemakai air irigasi. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka ikut serta mengelola jaringan irigasi. Pemberdayaan ini sangat penting dirasakan karena antara lain kebutuhan akan air irigasi dan jaringannya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga merekalah yang mengetahuinya. Selain itu sangat penting untuk menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Pada akhirnya kelangsungan pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan jaringan irigasi akan dapat menjamin keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan/*sustainability development and management*.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi juga sesuai dengan pedoman-pedoman normatif seperti UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, Kep. Menkimpraswil No. 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Kep. Mendagri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A dan PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Di Daerah Irigasi Mendut Kabupaten Semarang, proses pemberian kewenangan dan pemberdayaan masyarakat telah diupayakan untuk dilakukan, meskipun secara bertahap. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan mulai mengelola jaringan tersier yang bersinggungan langsung dengan kepentingan petani yang diakomodasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Termasuk dalam pembiayaan yang dilakukan melalui iuran.

Namun upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tersebut belum dapat dikatakan berhasil dengan baik karena terdapat beberapa masalah seperti kelembagaan P3A yang tidak berjalan dengan baik, pembiayaan jaringan irigasi yang berupa Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) dari masyarakat sendiri yang tidak berjalan lancar.

Daerah Irigasi Mendut yang terdiri atas 8 (delapan) desa sebenarnya memiliki P3A tersendiri untuk masing-masing desa dan tergabung dalam P3A Gabungan. Namun demikian organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan aktif dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Persoalan-persoalan tersebut timbul karena adanya masalah klasik seperti tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang relatif rendah. Hal ini juga terkait dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat di Mendut. Selain itu dapat juga karena perhatian, pembinaan dan sosialisasi pemerintah daerah serta dinas terkait yang kurang dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Dari berbagai persoalan yang timbul di Daerah Irigasi Mendut tersebut perlu adanya suatu identifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan upaya-upaya peningkatannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui kondisi secara lebih jelas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Sekaligus untuk mengetahui beberapa upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Perubahan orientasi kebijakan pembangunan dengan pemberlakuan otonomi daerah menuntut peran aktif dari pemerintah daerah. Demikian juga untuk perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi, peran serta masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi, terutama di sektor-sektor tersier yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Hal ini juga sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan peraturan pemerintah/keputusan menteri yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan irigasi dan pelimpahannya kepada masyarakat melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun demikian penerapannya tidaklah semudah yang diinginkan.

Hal itu disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan/pengetahuan masyarakat petani pemakai air yang masih relatif rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah menjadi hambatan tersendiri, terutama dalam transfer pengetahuan dan kemampuan pengelolaan jaringan irigasi.
- b. Kesulitan dalam menghimpun dana pengelolaan irigasi dari masyarakat melalui Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR). Pengumpulan iuran irigasi tidak berjalan.
- c. Banyaknya kerusakan jaringan irigasi di wilayah DI Mendut karena kurangnya pemeliharaan dan perbaikan jaringan serta dana irigasi.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas dapat menyebabkan kendala dalam implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga dapat diambil sebuah *research question* yaitu **bagaimanakah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan upaya peningkatannya?**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui kondisi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan upaya-upaya peningkatannya di Daerah Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang akan ditentukan adalah:

- a. Menganalisis karakteristik masyarakat DI Mendut
- b. Menganalisis sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
- c. Menganalisis pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi
- d. Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut,
- e. Menganalisis upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi Mendut.